

**BKN**

Badan Kepegawaian Negara

Jl. LetjenSutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640Telp 021-80882815, Fax. 021-8090421

Web: www.bkn.go.id, Email: bnkri@gmail.com, Twitter: @BKNgoid, Facebook: BKNgoid

Siaran Pers

BKN Telah Tetapkan Payung Hukum Pengalihan Status PNS

Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, negara melakukan efisiensi dan efektivitas dalam urusan pemerintahan konkuren (Pasal 11), di mana kewenangan urusan pemerintahan dibagi antara Pusat dan Daerah. Untuk menindaklanjuti UU ini, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diikuti oleh beberapa pengaturan teknis oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri.

Sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang ditugasi dan diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Nasional (ASN) secara nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 9 Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) sebagai payung hukum proses pengalihan status ini.

Dengan telah ditetapkan 9 Perka tersebut, BKN sudah pula melakukan pengalihan status PNS pada sejumlah urusan, dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dan dari kabupaten/kota ke pusat.

Ikhtisar Perka BKN yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Perka BKN	Tentang	Kementerian/Lembaga
1.	48/2015	Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi PNS Daerah Provinsi	Kementerian Ketenagakerjaan
2.	1/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3.	6/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB Menjadi PNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN
4.	2/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi PNS Daerah Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	8/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kementerian Perhubungan
6.	9/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi yang Melaksanakan Metrologi Legal Menjadi PNS Daerah Kabupaten/Kota	Kementerian ESDM
7.	10/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian ESDM
8.	7/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan Menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.	19/2016	Pelaksanaan Pengalihan PNS Provinsi UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BKN siap bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar proses pengalihan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Jakarta, 3 Januari 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Mohammad Ridwan
NIP. 19730521 199912 1 001